

LAPORAN TINDAK LANJUT

**HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS I A KHUSUS
TRIWULAN I TAHUN 2025**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TINDAK LANJUT

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TRIWULAN I TAHUN 2025

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Makassar
Pada Hari Rabu, 30 April 2025

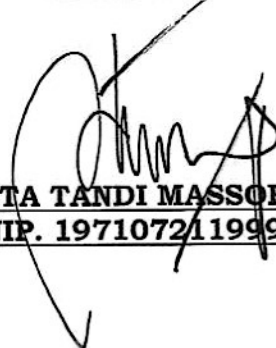
Top Management,


Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.
NIP. 196807181994031005

Sekretaris Tim Survei,


NURIYA AWAD, S.H
NIP. 19750330200002002

Ketua Tim Survei,


DJULITA TANDI MASSORA, S.H, M.H.
NIP. 197107211999032003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Makassar mampu menyelesaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat TRIWULAN I TAHUN 2025.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang diambil secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 30 April 2025

Tim Survei

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tujuan dan Sasaran	6
C. Prinsip	6
D. Pelaksanaan	7
E. Tahapan Pelaksanaan.....	7
BAB II HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN	9
BAB III ANALISA DAN TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 	11
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	22
A. Kesimpulan.....	22
B. Rekomendasi	23
RUJUKAN:	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari pelayanan yang baik. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan media sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan

pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus . Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Transparan

Hasil survey kepuasan masyarakat harus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survey melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survey Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku

4. Berkesinambungan

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

5. Keadilan

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental

6. Netralitas

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Pelaksanaan

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini dilaksanakan pada Bulan Januari s/d Maret 2025.

E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.

2. Tim survei menyiapkan fasilitas untuk pengambilan responden secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dimana instrument kuesioner pada Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Memastikan bahwa computer/pc yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
4. Membuka browser / peramban halaman website
5. Membuka alamat website:
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099422>
6. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sejumlah 106 data. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **94,61% atau pada nilai 3,78** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 88,31 – 100,00) Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang telah ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 90%. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut belum mencapai sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Hasil
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Nomor	Unsur Persyaratan Pelayanan	NRR	IKM Perunsur	Ket.
1	Kesesuaian Persyaratan	3,824	95,6%	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,853	96,3%	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,647	91,1%	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,706	92,6%	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,882	97,05%	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,735	93,3%	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,676	91,9%	Sangat Baik
8	Sarana Prasarana	3,735	93,3%	Sangat Baik
9	Penanganan Masukan dan Saran	4,000	100%	Sangat Baik

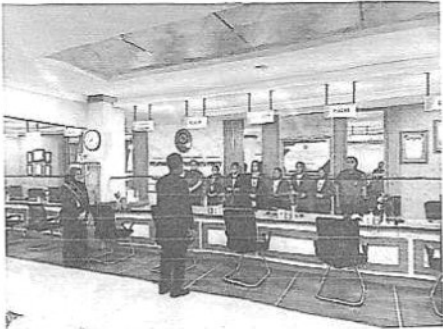
Berikut ini 3 unsur terendah pada Hasil Survey Kepuasan Masyarakat TRIWULAN I TAHUN 2025.

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Indikator Waktu Penyelesaian (U3)	3,647	124
2	Indikator Perilaku Pelaksana (U7)	3,676	127
3	Indikator Biaya/Tarif (U4)	3,706	125

Adapun Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat TRIWULAN I TAHUN 2025 akan disajikan pada Bab 3.

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS		Nomor	
	Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar		Revisi	
	FORM NOTULEN		Tanggal	23 APRIL 2025
	BRIEFING PTSP		Halaman	Halaman 2

APEL PAGI



	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS		Nomor	
	Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar		Revisi	
	FORM NOTULEN		Tanggal	23 APRIL 2025
	BRIEFING PTSP		Halaman	Halaman 3

APEL SORE



Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN HARIAN PTSP PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025

Nama Penanggung Jawab : Nawir, S.H.
Nama Petugas : Anita Sri Andika, S.H.

No. Ruang	Item Layanan	Perkiraan
1 Ruang Tata Usaha	Surat Masuk Tamu Layanan Permohonan Informasi Salah Antrian Jumlah keseluruhan layanan	1 Petugas : Nazman 1 2 4 39 Surat dari pos
2 Ruang E Court	Aktivas Akun Konfirmasi Permohonan Ditolak Jeda pendaftaran gugatan sederhana Buat Akun E court Upload Jawaban Tergugat Diklar Kuasa Hukum Tergugat Upload Jawaban Tergugat Upload Replik Tergugat Upload Surat Kuasa Tergugat Antrian Kasong Lain-lain Salah Antrian Jumlah keseluruhan layanan	Petugas : Dio Panca, S.H. 7 8 Informasi pengembalian e salinan, stiker perkara 15
3 Kepaniteraan Pidata	Surat Masuk Pendaftaran Upaya Hukum, Pemeriksaan Memori dan Kestara Kasasi Kasasi PK Kasasi Menyeri Kasasi Pemeriksaan Kembali Permohonan Eksekusi Pendaftaran Gugatan Pendaftaran Permohonan Salinan Putusan Pengembalian Sisa Penjar Bayar Panjar Eksekusi Bayar tambah biaya panjar Bayar PS Kesepakatan perdamaian Permohonan Informasi Kecelakaan Gagal Layanan Lain-lain Antrian Kasong Salah Antrian Jumlah keseluruhan layanan	4 Petugas : Silvana Mustika, S.H. 1 Kasasi PK 4 1 7 1 1 19 Stempel Gugatan

3 Kepaniteraan Negeri	Surat Masuk Pemeriksaan Surat Keterangan Paksa Perusahaan Pendaftaran Perikara Pendaftaran Upaya Hukum, Pemeriksaan Memori dan Kestara Kasasi Permohonan Salinan Putusan Permohonan Informasi PSP Permohonan PK Lain-lain Salah Antrian Jumlah keseluruhan layanan	Petugas : Fitriyana, S.H. 0 HIRIS
4 Kepaniteraan PH	Surat Masuk Pendaftaran Perikara Pendaftaran Upaya Hukum, Pemeriksaan Memori dan Kestara Memori Kasasi Pendaftaran Perjanjian Bersama Eksekusi Permohonan Informasi Pengembalian Salinan Putusan Gagal Layanan Lain-lain Antrian Kasong Jumlah keseluruhan layanan	Petugas : Benedikta Yandhine, S.H. 1 Nota Pemeriksaan Khawatir 1
5 Kepaniteraan Pidata	Surat Masuk Pendaftaran Upaya Hukum, Pemeriksaan Memori Bandung Memori Bandung Kasasi Kasasi PK Kasasi Menyeri Kasasi Pemeriksaan Kembali Permohonan Eksekusi Pendaftaran Gugatan Pendaftaran Permohonan Salinan Putusan Pengembalian Sisa Penjar Bayar Panjar Eksekusi Bayar tambah biaya panjar Bayar PS Kesepakatan perdamaian Permohonan Informasi Kecelakaan Gagal Layanan Lain-lain Antrian Kasong Salah Antrian Jumlah keseluruhan layanan	2 Petugas : Adelia Satori, S.H. 2 1 3 1 1 21 Berkas 1 6 5 Informasi perkara 1 Tilang 2 25
6 Kepaniteraan Tipikor	Surat Masuk Pendaftaran Upaya Hukum, Pemeriksaan Memori dan Kestara Bandung Kasasi Kasasi PK Kasasi Menyeri Kasasi Pemeriksaan Kembali	1 Petugas : Anita Sri Andika, S.H.

			 Makassar, 23 April 2025 Pengantar PTSP (NANTI S.H.) Petugas PTSP (NANTI S.H.) Pengantar PTSP (ANSELATUS A. MAHDI, S.H.) CS Dipindai dengan CamScanner
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan (U7)	Pembekalan pelayanan dan penanaman integritas kepada petugas PTSP	Memberikan pembekalan kepada seluruh petugas PTSP agar senantiasa mengikuti SOP dalam melayani masyarakat. Meningkatkan Kembali kepada petugas PTSP agar dalam memberikan pelayanan selalu menerapkan 6 S, yaitu: Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun, dan Sabar. Berikut ini salah satu kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala, Ibu Hikmawati, S.H. pada Hari Kamis, 10 April 2025

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS		Nomor	WILAYAH KECAMATAN KALAMATI KOTA MAKASSAR
	Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar		Revisi	-
	FORM NOTULEN		Tanggal	15 Juni 2022
	BRIEFING PTSP		Halaman	Halaman 3 dari 3

HARI/TANGGAL	Kamis/ 10 April 2025		
LOKASI BRIEFING	Area PTSP	☐ DAFTAR HADIR	
MULAI WAKTU BRIEFING	08.15 WITA	AKHIR RAPAT	08.20 WITA
PENANGGUNG JAWAB	HIKMAWATI, SH (KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA)		
NOTULEN	SITI AISYAH, SH (Sta Umum)		

BAHASAN MATERI BRIEFING	
CATATAN	KESIMPULAN
Briefing PTSP dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Ibu Hikmawati, SH selaku Penanggung Jawab PTSP pada hari Kamis, 10 April 2025 memberikan pengarahannya sebagai berikut:	Berdasarkan Pengarahan dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala Ibu Hikmawati, SH selaku Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu (PTSP) :
- Agar seluruh Petugas PTSP dalam memberikan Pelayanan untuk selalu menerapkan 6 S yaitu : SENTUN, SAPA, SALAM, SOPAN, SANTUN dan SABAR. - Kepada seluruh petugas PTSP dalam memberikan pelayanan diharapkan agar selalu menjaga integritas, bekerja secara efisien dan bertanggung jawab. - Petugas PTSP agar tepat waktu dan jangan terlambat mengikuti briefing sebisa mungkin jangan terlalu lama meninggalkan area layanan dan atau area layanan dalam keadaan kosong, diharapkan kembali tepat waktu setelah jam istirahat siang.	- Agar diperhatikan, ditindaklanjuti dan dipertahankan. - Agar diperhatikan, ditindaklanjuti dan dipertahankan. - Agar diperhatikan, disindaklanjuti dan dipertahankan.

TANDA TANGAN	
DIBUAT	DISAHKAN
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD
 SITI AISYAH, SH	 HIKMAWATI, SH

Dipindai dengan CamScanner

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS		Nomor	WILAYAH KECAMATAN KALAMATI KOTA MAKASSAR
	Jalan R. A. KARTINI NO. 18/23 Makassar		Revisi	-
	FORM NOTULEN		Tanggal	15 Juni 2022
	BRIEFING PTSP		Halaman	Halaman 3 dari 3

DOKUMENTASI APEL PAGI

Dipindai dengan CamScanner

Katman Pengawas PESP,
Siti Nurul Huda, S.P., M.P.

- 3 Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan tidak dipungut biaya/gratis? (U4)
- Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai layanan biaya layanan yang ada di Pengadilan Negeri Makassar.
- Memberikan arahan kepada Duta Layanan dan Petugas PTSP agar menginfokan kepada masyarakat bahwa di Pengadilan Negeri Makassar terdapat pembebasan biaya perkara (prodeo) yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Berikut ini salah satu kegiatan yang dipimpin oleh Panitera Muda PHI, Ibu Andi Siti Nurasiwati pada Hari Senin, 21 April 2025

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS				Nomor	
Jalan R. A. KARTINI No. 18/23 Makassar				Revisi	
FORM NOTULEN				Tanggal 19 JANUARI 2025	
BRIEFING PTSP				Halaman Halaman 1	
HARI/TANGGAL	SENIN, 21 APRIL 2025			KEPERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI BRIEFING	AREA PTSP			☐ DAFTAR HADIR	
MULAI WAKTU BRIEFING	08.10 WITA	AKHIR RAPAT	08.20 WITA	☐ INTERNAL MEMO	
PENANGGUNG JAWAB :	ANDI SITI NURASIWATI, S.H. (PANITERA MUDA PHI)				
NOTULEN	BENEDIKTA TANDILINO, S.H. (STAF PHI)				
BAHASAN MATERI BRIEFING					
CATATAN			KESIMPULAN		
REEL PAGI : Briefing Pagi PTSP dipimpin oleh Panitera Muda PHI Ibu Andi Siti Nurasiwati, S.H. selaku Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memberi Pengarahan sebagai berikut: - Dihimbau kepada seluruh Petugas PTSP agar bekerja dengan penuh integritas, memperhatikan 5 R dan 5 R dan memperhatikan 5R masing masing: - Petugas PTSP dalam melaksanakan tugas agar bisa bekerjasama serta senantiasa menjaga ketertarikan. - Apabila ada kendala segera laporkan ke Penanggung Jawab PTSP pada hari itu. APEL SIANG : Briefing Siang PTSP dipimpin oleh Panitera Muda PHI Ibu Andi Siti Nurasiwati, S.H. selaku Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyampaikan bahwa : - Seluruh Petugas PTSP, Duta Pelayanan, Pustakom dan Security melaksanakan tugas dengan baik. - Duta Pelayanan dan Security untuk memperhatikan jam pelayanan, jika sudah mendekati jam istirahat dan jam pulang agar mengingatkan para pengguna layanan untuk meninggalkan area PTSP atau area PTSP sudah dalam keadaan kosong.			REEL PAGI : Berdasarkan Pengarahan dari Panitera Muda PHI, Ibu Andi Siti Nurasiwati, S.H. selaku Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): - Agar diperhatikan dan dipertahankan. APEL SIANG : - Kondisi Aman Terkendali. Referensi : - Duta Pelayanan : Rendy Yusa AUL SH - Security : Rangga		
TANDA TANGAN					
NOTULIS			DISAHKAN		
NAMA LENGKAP & TTD			NAMA LENGKAP & TTD		
PETUGAS PTSP PHI,  BENEDIKTA TANDILINO, S.H.			PANITERA MUDA PHI,  ANDI SITI NURASIWATI, S.H.		

Laporan Harian PTSP

1 | Page

CS Dipindai dengan CamScanner

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS			Nomor	
	Jalan R. A. KARTINI NO. 10/23 Makassar			Revisi	
	FORM NOTULEN			Tanggal	10 JANUARI 2025
	BRIEFING PTSP			Halaman	Halaman 2

DOKUMENTASI APEL PAGI



Laporan Harian PTSP

21 Page

Dipindai dengan CamScanner

	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS			Nomor	
	Jalan R. A. KARTINI NO. 10/23 Makassar			Revisi	
	FORM NOTULEN			Tanggal	10 JANUARI 2025
	BRIEFING PTSP			Halaman	Halaman 3

DOKUMENTASI APEL SORE



Laporan Harian PTSP

31 Page

Dipindai dengan CamScanner

Pengantar dari PTSP
 (KEMENDUKUMHUKUM, SA)
 (KEMENDUKUMHUKUM, SA)
 (KEMENDUKUMHUKUM, SA)

Mempublikasi prosedur pembebasan biaya perkara (Prodeo) pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar.

**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**
Jl. Jendral Sudirman No. 1, Makassar 90000
Telp. (0411) 5123456, Fax (0411) 5123457, Email: pnm@pnmakassar.go.id

Beranda Tentang Pengadilan Layanan Publik **PRODEO** Berita Hukum Kami Kontak Kami

1. **Jenis Perkara** : 1. Perkara Negeri 2. Perkara Perdata 3. Perkara Pidana 4. Perkara Tata Usaha Negara 5. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 6. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 7. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 8. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 9. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 10. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan

PROSEDUR PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)

1. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri 2. Perkara Perdata 3. Perkara Pidana 4. Perkara Tata Usaha Negara 5. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 6. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 7. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 8. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 9. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 10. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan

2. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri 3. Perkara Perdata 4. Perkara Pidana 5. Perkara Tata Usaha Negara 6. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 7. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 8. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 9. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 10. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan

3. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri 4. Perkara Perdata 5. Perkara Pidana 6. Perkara Tata Usaha Negara 7. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 8. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 9. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 10. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan

4. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri 5. Perkara Perdata 6. Perkara Pidana 7. Perkara Tata Usaha Negara 8. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 9. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 10. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan

5. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri 6. Perkara Perdata 7. Perkara Pidana 8. Perkara Tata Usaha Negara 9. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan 10. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan

6. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri 7. Perkara Perdata 8. Perkara Pidana 9. Perkara Tata Usaha Negara 10. Perkara Peradilan Tata Kelola Pemerintahan

7. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri 8. Perkara Perdata 9. Perkara Pidana 10. Perkara Tata Usaha Negara

8. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri 9. Perkara Perdata 10. Perkara Pidana

9. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri 10. Perkara Perdata

10. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

11. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

12. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

13. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

14. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

15. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

16. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

17. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

18. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

19. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

20. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

21. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

22. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

23. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

24. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

25. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

26. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

27. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

28. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

29. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

30. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

31. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

32. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

33. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

34. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

35. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

36. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

37. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

38. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

39. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

40. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

41. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

42. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

43. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

44. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

45. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

46. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

47. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

48. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

49. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

50. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

51. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

52. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

53. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

54. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

55. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

56. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

57. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

58. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

59. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

60. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

61. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

62. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

63. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

64. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

65. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

66. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

67. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

68. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

69. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

70. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

71. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

72. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

73. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

74. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

75. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

76. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

77. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

78. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

79. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

80. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

81. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

82. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

83. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

84. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

85. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

86. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

87. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

88. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

89. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

90. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

91. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

92. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

93. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

94. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

95. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

96. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

97. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

98. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

99. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

100. **Kategori Perkara** : Perkara Negeri

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **94,61%** dan pada skala 4 sebesar **3,78** berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Capaian ini belum sesuai dari target pada IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah ditetapkan ditahun 2024 sebesar 90%. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,824** berada pada kategori **SANGAT BAIK**
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,853** berada pada kategori **SANGAT BAIK**
3. Waktu Penyelesaian di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,647** pada kategori **SANGAT BAIK**
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,706** pada kategori **SANGAT BAIK**
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,882** pada kategori **SANGAT BAIK**
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,735** pada kategori **SANGAT BAIK**
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,676** pada kategori **SANGAT BAIK**
8. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **3,735** pada kategori **SANGAT BAIK**

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan nilai rata-rata per unsur **4,00** pada kategori **SANGAT BAIK**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, Kompetensi Pelaksana Pelayanan, dan Sistem, Perilaku Pelaksana Pelayanan.

B. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Sistem, Mekanisme, Prosedur, Waktu Pelayanan, dan Keseuaian Persyaratan. Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada kategori sangat baik akan tetapi berada pada unsur terendah, sehingga untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP
2. Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.
3. Agar Petugas PTSP diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk SOP serta penerapan Reward dan Punishment
4. Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Makassar: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

Dashboard

SURVEY KERUSAKAN HIASYARAKAT

Survey Kerusakan Masyarakat | Surveillance

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencan beadilan yang menerima pada periode 2024/09/01-01/10/2024

Data Responden
Formulir Responden dan Transkrip

Layanan
Formulir Layanan

Form Kuesioner
Formulir Kuesioner dan Transkrip

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir

Home

Formulir

Formulir

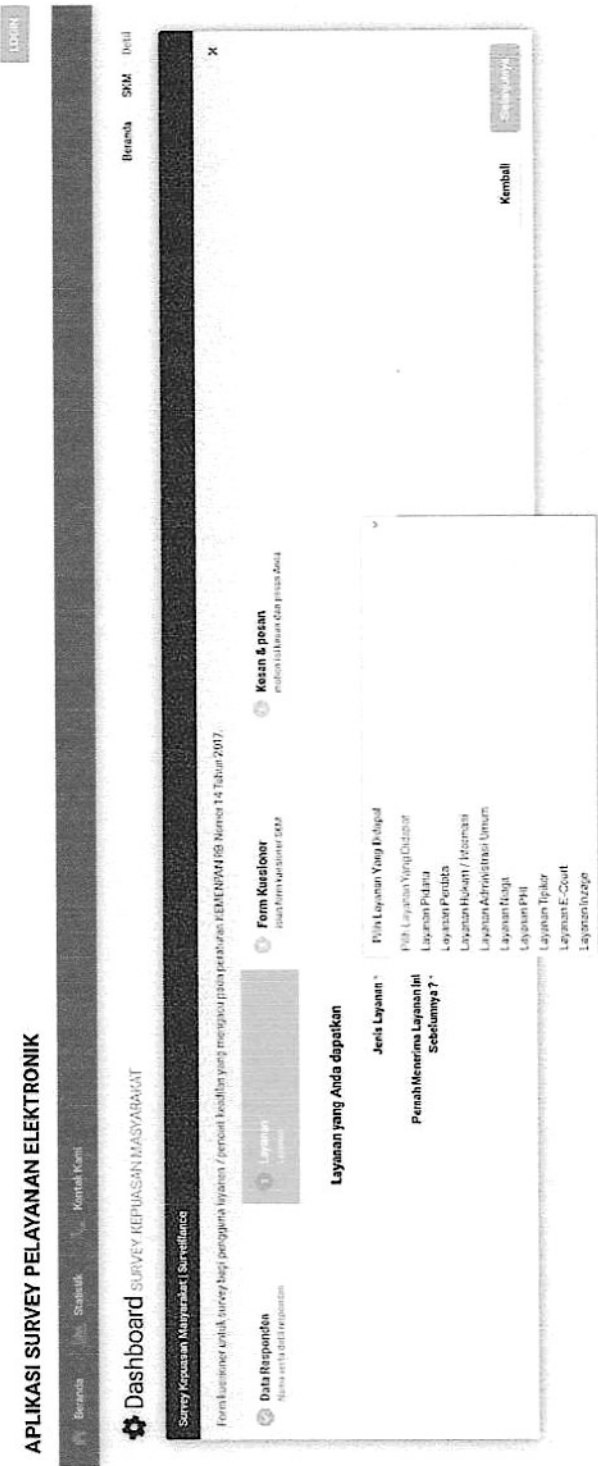
Formulir

Home

Formulir

Formulir

Formulir
 </



Realtime

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Dashboard

Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat | Surveillance

Survei Kepuasan Masyarakat (Surveillance)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian penyajian yang diterima pada pelayanan dengan jasa pelayanannya pada Pengadilan ?
Tidak Sesuai
Kurang Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai

2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?
Tidak Mudah
Kurang Mudah
Mudah
Sangat Mudah

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?
Tidak Cepat
Kurang Cepat
Cepat
Sangat Cepat

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan TIDAK DIPUNGUT BIAYA/GRAIS ?
Tidak Setuju
Kurang Setuju
Setuju
Sangat Setuju

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jasa layanan yang diberikan ?
Tidak Sesuai
Kurang Sesuai
Sesuai
Sangat Sesuai

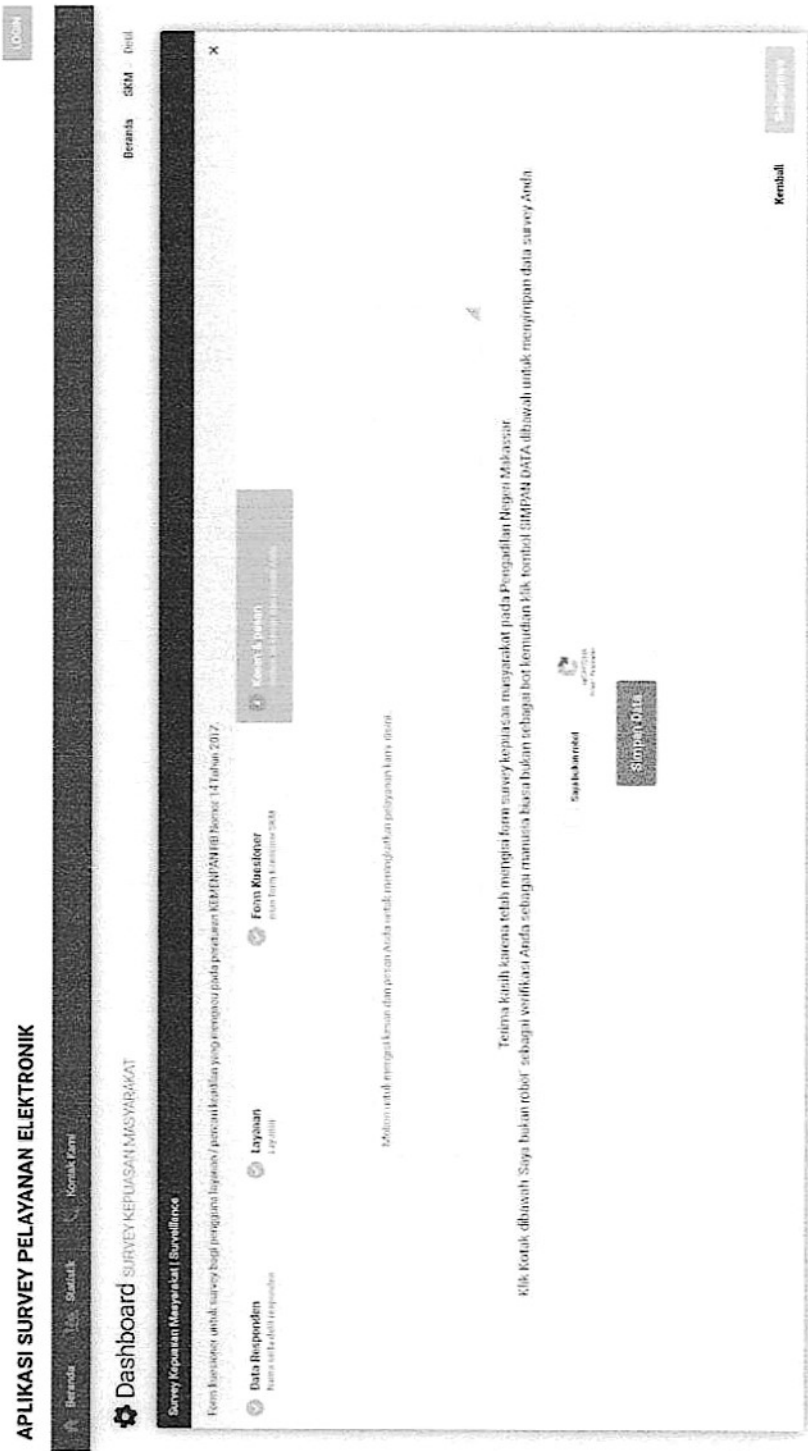
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?
Tidak Kompeten
Kurang Kompeten
Kompeten
Sangat Kompeten

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?
Tidak Sopan dan Ramah
Kurang Sopan dan Ramah
Sopan dan Ramah
Sangat Sopan dan Ramah

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?
Buruk
Cukup
Baik
Sangat Baik

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana pendukung pengguna pelayanan ?
Tidak ada
Ada tetapi tidak dapat diakses
Kurang maksimal
Berfungsi dan dikelola dengan baik

Kembali



11/04/25, 16:10

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAH) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Jln. R.A. Kartini No. 18/23 KOTA MAKASSAR
SULAWESI SELATAN
<http://www.pn-makassar.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI INDEKS

3,78 / 94,61%

Jumlah	34 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 10 PEREMPUAN : 24
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0Diploma 2 : 0 SD : 0Diploma 3 : 0 SMP : 0S1 : 20 SMU : 7S2 : 6 Diploma 1 : 0S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 1SWASTA : 0 TNI : 0WIRUSAHA : 0 POLRI : 0TENAGA KONTRAK : 1 LAINNYA : 32

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? | 3,647 |
| 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ? | 3,676 |
| 3. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? | 3,706 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

11 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri

-25-

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

-26-

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR